



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1208

Penerapan Metode *Isti<u>h</u>san* Pada Bidang *Muâmalah Mâliyyah* (Hukum Ekonomi Syariah)

Panji Adam

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari 24-26 Bandung Correspondence email: panjiadam06@gmail.com

Abstrak. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama ushul fikih, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama mengguakannya secara praktis. Penetapan hukum dengan metode istihsan banyak dilakukan oleh ulama di kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah sehingga dalam sejarah ushul fikih, golongan Hanafiyyah dikenal sebagai golongan yang memakai istihsan sebagai salah satu metode istinbath al-ahkam (penetapan hukum). Imam Syafi'i adalah ulama yang menolak istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Namun dalam praktiknya Imam Syafi'i pun menggunakan istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Ilmu ushul fikih memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi atas eksistensi hukum Islam khususnya bidang hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbath al-ahkam, yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara' serta berfungsi dalam menentukan keabsahan suatu akad/transaksi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Istihsan; mazhab Hanafiyyah; mazhab Syafi'iyyah; Mu'amalah Maliyyah

Abstract. Istihsan is one of the ijihad methods disputed by the scholars ushul fiqh, although in reality, all scholars use it practically. The establishment of the law by istihsan method is widely carried out by scholars among the Hanafiyyah and Malikiyyah so that in the history of ushul fiqh, the Hanafiyyah are known as the group that uses istihsan as one of the methods of istihbâth al-ahkâm (determination of the law). Imam Shafi'i is a cleric who rejects istihsan as a method of determining Islamic law. But in practice Imam Shafi'i also uses istihsan as a method of determining Islamic law. The science of ushul fikih has a significant role in contributing to the existence of Islamic law, especially in the field of Sharia economic law. Research method conducted based on normative juridical approach, The specification of research used is analytical descriptive, The type of data used in this research, namely secondary data, data collection method used is literature study and analysis of secondary data that is qualitative. The results showed that istihsan is one of the methods of istinbâth al-ahkâm, which can be used as an argument and a proof of syara' and serves in determining the validity of an agreement / transaction in the field of Sharia economic law.

Keywords: Istihsan; hanafiyyah sect; shafi'iyyah sect; Mu'amalah Maliyyah

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang dalil-dalil metode penetapan hukum Islam dalam kajian ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua bagian kelompok besar, yakni dalil-dalil yang disepakati (al-Adillah al-Muttafaq 'Alaiha) dan dalil-dalil yang diperselisihkan (al-Adillah al-Mukhtlaf Fîha).(Syawaluddin Hanafi, 2020)

Dalam kajian ilmu ushul fikih, hampir semua kitab-kitab ushul fikih menyebutkan bahwa metode ijtihad sering disebut dengan dalil-dalil *syara*' yang penggunaannya tidak disepakati oleh ulama sebagai pelengkap dari empat dalil *syara*' yang disepakati, yaitu Alquran, hadis, ijmak (konsensu) dan *qiyâs* (analogi).

Diantara dalil-dalil dalam metode penetapan hukum Islam yang masih bersifat *mukhtalaf fîh* (diperselisihkan) kehujjahannya adalah *isti<u>h</u>san*. Sekalipun metode *isti<u>h</u>san* merupakan dalil *syara* yang tidak disepakati, namun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakan *isti<u>h</u>san* dalam arti *lughawi* (etimologis), yaitu "berbuat sesuatu yang lebih baik".

Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama ushul fikih terjadi perbedaan disebabkan oleh perbedaan dalam memahami serta memberikan definisi "istihsan" itu sendiri.

Istihsan secara konsep merupakan suatu kecendrungan untuk mengambil dan mengamalkan hukum karena dinilai sebagai hukum yang lebih baik bila dibandingkan dengan praktik yang berlaku dari hukum asal.(Chadzik, 2019) Istihsan merupakan dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi dan istinbâth hukum oleh dua Imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai pemakaian istihsan hingga 90% dan seluruh ilmu fikih.(Bakhtiar Hasan, 2015)

Menurut mereka *isti<u>h</u>san* dapat menjadi dalil *syara'*. *Isti<u>h</u>san* dapat menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh *qiyâs* atau umum *nash*. Tegasnya menurut mereka, *isti<u>h</u>san* dapat dijadikan sebagai dalil (<u>h</u>ujjah). Al- Taftazani berpendapat bahwa *isti<u>h</u>san* adalah salah satu dan dalil-

dalil yang disepakati oleh para ulama, karena istihsan didasarkan kepada nash, atau kepada ijma, atau kepada darurat, atau kepada qiyâs khafî.

Imam Syafi"i merupakan salah satu ulama yang dengan tegas membatalkan tentang dalil Istihsan, karena itu ia menguraikannya dalam pasal tersendiri yang terdapat di dalam kitabnya yaitu al-Umm dengan judul "Ibthal al-Istihsan" (pembatalan istihsan).(Kadenun, 2018). Imam al-Syafi'i menolak metode istihsan karena memandangnya sebagai cara istinbâth hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja.

Dalam setiap aspek hukum yang terkait dengan kajian muamalah maliyah (hukum ekonomi syariah), maka keterlibatan serta kontribusi para fukaha (ahli hukum Islam) menjadi penting untuk berperan dalam hal melakukan ijtihad guna memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan bisnis yang muncul, baik pada skala makro maupun mikro.

Dalam rangka mengembangkan ekonimi dan bisnis syariah serta merespon kondisi perekonomian hari inipara ulama harus cermat serta kreatif dalam mengembangkan hukum Islam khsusunya di bidang hukum ekonomi syariah dengan menggunakan metode istinbâth hukum yang relevan. Istihsan yang dikembangkan dan dicetuskan oleh Imam Hanafi yang mewakili kelompok rasionalis, tentu metode ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah. Dikarenakan lebih mengedepankan rasionalitas istihsan yang dipandang mempunyai porsi yang sangat lebih dibandingakan dengan metode yang mengedepankan teks belaka.(Nur'aini, 2020)

Dengan demikian perlu dilakukan sebuah penelitian dalam rangka mengidentifikasi penerapan metode istihsan dalam bidang mu'amalah malivyah atau hukum ekonomi syariah guna memberikan kepastian terkait kebasahan sebuah akad/transaksi berlandaskan teori ilmu ushul fikih.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985)

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan

data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesishipotesis.(Adi, 2004)

Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, yaitu kitab-kitab atau buku-buku literatur ushul fikih yang relevan dengan fokus penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian diterapkan secara deduktif terhadap fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Istihsan dalam Literatur Ushûl Fikih

Ali Hasab Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* secara etimologis adalah:

عد الشيء حسنا "Memandang baik terhadap sesuatu".(Ali Hasab Allah, 1971)

Adapun pengertian istihsan secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

عدول المجتهيد عن مقتضى قياس جلى الي قياس خفي, او عن دليل الكلي الى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لدليله هذا العدول "Bepindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyâs jaly kepada qiyâs khafy, atau dari dalil-dlail kully kepada hukum pengecualian (khusus) karena terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid merubah pikirannya dan mementingan perpindahan" (Khallaf, 2013).

Merangkum berbagai pendapat para ahli ushul mengenai definisi istihsan, Wahbah Zuhaili, (Wahbah al-Zuhaili, 2006) memberikan dua definisi, yaitu:

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل "Memakai qiyâs khafy dan meninggalkan qiyâs jaly

karena terdapat petunjuk untuk itu"

استثناء مسالة جزئية من اصلى كلي, او قاعدة عامة, بناء على دليل خاص يقتضى ذلك

"Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum kerana ada petunjuk untuk hal tersebut".

Istihsan yang disebut pertama dikenal dengan istihsan qiyasi, sedangkan yang kedua disebut dengan istihsan istisaiy. Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk qiyâs, yaitu qiyâs jaly atau qiyâs khafy. Pada dasarnya jika dilihat dari kejalasan illat qiyas jaly lebih lantas didahulukan atas qiyâs khafy. Dalam hal ini Imam

<u>H</u>anafi berpendapat: Jika *qiyâs khafy* lebih besar manfaatnya, maka *qiyâs jaly* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai *qiyâs khafy* praktik seperti inilah yang dikenal dengan *istihsan qiyasi*.

Para ulama ushul fikih menginformasikan bahwa lafadz *isti<u>h</u>san* terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Dasar *isti<u>h</u>san* dalam Alquran adalah firman Allah Swt dalam surah al-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya..."

Ayat di atas menjadi landasan argumentasi mengenai ke-<u>h</u>ujjah-an serta kebolehan menggunakan metode *isti<u>h</u>san* menurut kalangan ulama Hanafiyyah.(Habibullah, 2017)

dan Alquran surah al-'Araf (7) ayat 145 yang berbunyi:

",,,dan perintahkanlah kaummu untuk berpegang kepada (perintahnya) dengan sebaik-baiknya...

Serta dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang bersumber dari sahabat Ibn Mas'ud r.a sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya sebagai berikut:

"Sesuatu yang menurut umat Islam baik, adalah baik di sisi Allah Swt".(Hanbal, 2001)

Memperhatikan kehujjahan *isti<u>h</u>san* dan menggunakannya sebagai *istinbâth al-a<u>h</u>kâm*, memang menimbulkan *iktilâf* (perbedaban) di kalangan para ulama ushul. Imam Abu <u>H</u>anifah sebagai seorang ulama yang menampilkan *isti<u>h</u>san* sebagai salah satu dalil hukum, tak pelak lagi mendapatkan serangan dan kritik yang hebat dari lawan-lawannya yang menolak *isti<u>h</u>san* sebagai dalil hukum.

Dalam literatur uhsul fikih diinformasikan bahwa dalam persoalan *isti<u>h</u>san* terdapat 2 (dua) pendpaat ulama, kelompok yang berhujjah dan menggunakan *isti<u>h</u>san* sebagai dalil hukum sebagaimana dinyatakan oleh Abd al-Wahab Khallaf ialah terdiri dari mazhab <u>H</u>anafi, mazhab Maliki dan Mazhab <u>H</u>anbali. Kelompok ini mengatakan bahwa:

"Sesungguhnya (isti<u>h</u>san) adalah salah satu dalil hukum syara' dan isti<u>h</u>san digunakan untuk menetapkan berbagai hukum ketika berlawaan dengan qiyâs atau kaidah nash umum yang berlaku".(Khallaf, 2013)

Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa bagi mazhab <u>H</u>anafi dan Maliki penggunaan *isti<u>h</u>san* tidaklah keluar dari *nash syara*' dan Imam Abu <u>H</u>anifah sendiri mengatakan bahwa *isti<u>h</u>san* merupakan bagian dari dalil syara' selain dari *nash* yang tertulis.(Muhammad Abu Zahrah, n.d.). Menurut Zaky al-Din Sya'ban, *isti<u>h</u>san* merupakan salah satu dasar *istinbâth al-a<u>h</u>kâm* dalam mazhab <u>H</u>anafi dan mazhab Maliki (Zaky al-Din Sya'ban, 1965). Menurut mazhab <u>H</u>anafi, *isti<u>h</u>san* sebenarnya semacam *qiyâs*, yaitu memenangkan *qiyâs khafy* atas *qiyâs jaly* atau mengubah hukumyang telah ditetapkan pada suatu kasus atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya (Zulbaidah, 2016).

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa, banyak terdapat kata *isti<u>h</u>san* dalam pembicaraan mazhab <u>H</u>anafi dan mereke sering menjadikannya sebagai lawan *qiyâs* seraya berkata: *qiyâs* dapat menimbulkan keharaman dan *isti<u>h</u>san* bisa menimbulkan *ibâ<u>h</u>ah* (kebolehan). Maka mereka menjadikannya sebagai dalil syara' yang menentang dalil yang menyamainya dan mengadakan *tarjih* (pengunggulan) atasnya. Para penentang mereka telah menyangkal penamaan lafadz ini, karena mereka menganggapnya sebagai *tasyri*' tanpa dalil (Beik, 2003).

Tokoh yang sangat populer menentang *isti<u>h</u>san* sebagai hujjah dan dalil dalam *istinbâth* hukum adalah Imam Syafi'i. Sebagaimana dikutip oleh al-Ghazali, penolakan Syafi'i tercermin dalam pernyataannya yang sangat populer seagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع "Barangsiapa yang menggunakan isti<u>h</u>san maka ia telah membuat syariat" (Abu Hamid al-Ghazali,

Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risâlah* menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

1989).

أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال... و لا يقول بما استحسن شيءٌ يُحدِثه لا على مثالٍ سبق استحسن شيءٌ يُحدِثه لا على مثالٍ سبق "Tidak seorang pun berhak selain Rasulullah menetapkan sesuatu hukum tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan istihsan adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya" (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, 1940).

Pernyataan Imam Syafi'i di atas mengandung pengertian bahwa segala sesuatu harus mengacu kepada nash Alquran dan sunah, bukan dengan *istihsan*. Adapun alasan-alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* sebagai hujjah, sebagaimana dijelaskan oleh Romi sebagai berikut: (1) Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhya syariat berdasarkan nash-nash Alquran, sunah dan *qiyâs*, bukan berdasarkan *istihsan*; (2) menurut Syafi'i, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang

memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu; (3) selainjutnya Syafi'i beralasan bahwa Nabi Saw tidak pernah menetapkan hukum dengan *istihsan* dan beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya saja; (4) Nabi Saw menolak para sahabat menggunakan *istihsan*, yaitu ketetapan sahabat yang didasarkan pada apa yan mereka pandang baik; (5) sesungguhnya *istihsan* itu tidak pasti dan tidak jelas serta tidak dapat dijadikan ukuran untuk membedakan yang hak dengan yang batil, sebagaimana layaknya *qiyâs*; dan (6) jika mujtahid dibolehkan menggunakan *istihsan* berarti ia tidak lagi berpegang kepada nash, tetapi hanya berhujah pada akal semata.(Romli, 1999)

Sebetulnya apabila dicermati secara jeli, alasanalasan yang dikemukakan Syafi'i di atas dalam rangka penolkannya terhadap kelompok yang menggunakan istihsan, Hanafi, Maliki dan Hanbali, tidaklah seperti yang dibayangkan oleh Syafi'i, yaitu berdasarkan hawa nafsu saja, tetapi istihsan yang dilandasi oleh jiwa dan ruh nash syariat. Mazhab Maliki menggunakan istihsan bahwa pijakannya tidak keluar dari nash syariat, maka tetap berpijak pada landasan qiyâs, atsar, ijmâ', al-'urf dan al-dharûrah.

Perdebatan mengenai penggunaan *isti<u>h</u>san* didominasi oleh dua aliran, yaitu <u>H</u>anafiyah dan Syafi'iyah. Oleh karena itu, dalam perdebatan tersebut lebih mengedepankan pendapat kedua aliran ini. Imam Ghazali mengutip pendapat ulama <u>H</u>anafiyah sebagai berikut:

"Sebagian sahabat Abu <u>H</u>anifah berpendapat bahwa isti<u>h</u>san adalah suatu pendapat yang tidak ada dalilnya" (Abu Hamid al-Ghazali, 1989).

Terhadap pendapat tersebut, Imam al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:

"Ulama yang berpendapat demikian adalah kafir; dan ulama yang membolehkan berpegang kepad apendapat yang demikian juga kafir; dan ulama yang tidak membutuhkan dalil juga kafir".(Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Selanjutnya Imam al-Ghazali mengutip pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa *isti<u>h</u>san* adalah:

"Makna tersembunyi yang terdapat kesempitan untuk menjelaskan".(Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Terhadap pendapat tersebut, Imam al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:

وهذا أيضا هوس فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل

"Ini adlaah mengacaukan pula; sesungguhnya perintah-perintah Allah dapat dimengerti dengan akal; maka dengan mudah manusia dapat memahaminya; suatu (ketetepan syara') yang tidak dapat dimengerti adalah tidak masuk akal''.(Abu Hamid al-Ghazali, 1989)

Tampaknya, kalangan ulama Syafi'iyah telah melakukan klarifikasi *isti<u>h</u>san*. Imam al-Ghazali setelah menguraikan pendapat Imam al-Karkhi tentang *isti<u>h</u>san*, mengomentari pendapat al-Karkhi al-<u>H</u>anafi tersebut. dalam uraiannya, al-Karkhi membedakan *isti<u>h</u>san* kedalam empat kemungkinan, *pertama*, mengikuti hadis dan meninggalkan *qiyâs; kedua*, mengikuti (mengutamakan) *qawl* (pendapat) sahabat atas *qiyâs; ketiga*, mengikuti adat yang berlaku di masyarakat dan *keempat*, mengikuti makna yang tersembunyi.(Mubarok, 2002)

Dua macam yang pertama (mengikuti hadis dan qawl sahabat dengan mengabaikan qiyâs), sejalan dengan aliran Syafi'iyah. Secara implisit, Imam al-Ghazali menyebutkan sebagai istihsan shahîh; sedangkan dua bagian terakhir (mengikuti adat dan mengikuti makna yang tersembunyi) termasuk rusak (bathil). Klarisikasi ini, setidaknya dapat memberikan penjelasan kepada ulama bahwa istihan yang ditolak oleh Imam al-Syafi'i dan pengikutinya (termasuk al-Ghazali) adalah istihsan bathil. Dengan demikian, istihsan dalam artian selain yang ketiga dan keempat yang dikemukakan oleh al-Ghazali, tidaklah tertolak dalam pandangan ulama Syafi'iyah.(Mubarok, 2002)

Dalam praktiknya, Imam Syafi'i disadari atau tidak sebetulnya menggunakan metode *isti<u>h</u>san*. Terdapat beberapa bukti sebagaimana diinformasikan oleh al-Razi bahwa dalam praktiknya Imam Syafi'i menggunakan *isti<u>h</u>san*. Misalnya menyangkut kasus *mut'ah* (pemberian suami) bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, Imam Syafi'i mengatakan:

"Saya menganggap baik (lebih tepat) untuk menetapkan mut'ah pemberian suami bagi istri yang dicerai yang tidak memiliki anak sebesar tiga puluh dirham".(Al-Razi, 1997)

Demikian pula dalam masalah muamalah, contoh praktik Imam Syafi'i menggunakan *isti<u>h</u>san* berkenaan dengan kasus *syuf'ah*, Syafi'i menyatakan bahwa:

"Saya menganggap baik, jika orang yang memiliki kewenangan syuf'ah itu diberi waktu selama tiga hari".(Al-Razi, 1997)

Kedua contoh di atas, tentu merupakan butki bahwa dalam praktiknya Imam Syafi'i menggunakan metode istihsan. Begitu pula, banyak para ahli menyatakan bahwa pada dasarnya Syafi'i menggunakan istihsan dalam ijtihadnya. Mungkin sesekali Syafi'i, seperti dua contoh di atas, tidak menggunkan istihsan, tetapi pada praktiknya adalah istihsan. Jika demikian halnya, berarti antara Syafi'i yang menolak istihsan dengan kelompok yang menggunakannya sebagai hujah berbeda dalam mengartikan istihsan. Secara konseptual Syafi'i tidak memberikan formulasi istihsan, malah menokannya, tetapi dalam kegiatan ijtihadnya, secara tidak disadari, telah menggunakan istihsan sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok yang menggunakan istihsan. Dengan demikian, secara konsep apa yang dinamakan istihsan itu diterima oleh Syafi'i, tetapi penamaan konsep itu dengan istihsan tidak diterimanya, karena pemakaian istilah tersebut cenderung mengacu kepada membuat-buat syara sendiri berdasarakan hawa nafsu (taladzuz).

Apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil syara', maka akan ditemu bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Para ulama yang menolak keberadaan istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, ternyata dalam praktiknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima kehujiahan istihsan. Dalam masalah akad mudhârabah dan hukum-hukum lain yang dikemukakan ulama yang menerima kehujjahan istihsan juga diterima oleh para penolak kehujjahan istihsan. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak istihsan apabila dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh syara', sekalipun berdasarkan induksi dan berbagai ayat dan hadis. Adapun istihsan yang dilakukan semata-mata berdasarkan pendapat akal, maka seluruh ulama ushul fikih menolaknya, karena dalam masalah hukum syara' pendapat akal harus mendapat legalisasi dari nash, walaupun secara umum.(Khallaf, 2013)

Para ulama membagi *isti<u>h</u>san* kepada 6 (enam) macam, yaitu:

a. *Isti<u>h</u>san bi al-Nash* (istihsan berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Dalam konteks transaksi muamalah, misalnya akad *bai* ' (jual-beli) *salam* yang mana barang nya belum ada. Namun karena adanya *nash* dari hadis Nabi Saw yang membolehkan, maka jualbeli *salam* hukumnya adalah boleh.

Contoh lainnya adalah dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau *qiyâs* wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman

- Allah dalam surah al-Nisa (4) ayat 11. Berdasarkan ayat ini, kaidah umum tidak berlaku untuk masalah wasiat.
- b. *Isti<u>h</u>san bi al-ijmâ'* (istihsan yang didasarkan kepada ijmak). Dalam konteks muamalah, misal, ulama berijmak (sepakat) mengenai kebolehan melakukan akad *ijârah* atas pemandian umum meskipun terdapat unsur *gharar* mengenai jumlah air yang digunakan dan *gharar* pula jumlah air yang digunakan. Dan bolehnya *isti<u>h</u>san*, secara *qiyâs* dilarang, namun sudah berjalan dimasyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama (ijmak ulama bolehnya *isti<u>h</u>san*).
- c. Isti<u>h</u>san bi al-qiyâs al-khafiy (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi). Misalnya, dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyâs jaliy (giyas yang nyata), wakaf ini sama dengan akad jualbeli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah-tangankan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain ntuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut tidak termasuk akad wakaf itu, keciali iika di nyatakan dakan akad. Menurut qiyâs khafiy (qiyas yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan sewamenyewa, karena maksud dari wakaf adalag memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalir air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (qiyâs khafiy), maka ia disebut berdalil dengan istihsan.(Ma'ruf Amin, 2008)
- d. Istihsan bi al-mashlahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan). Dalam konteks muamalah, contohnya adalah ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pablik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduk di pabrik tersebut, kecuali atas kelalian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihata harta orang lain dari sikap tidak bertanggungjawab para buruh dan silitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama <u>H</u>anafiyyah menggunakan isti<u>h</u>san menyatakan dengan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.(Ma'ruf Amin, 2008)

Contoh lainnya adalah penerapan *reveneu sharing* pada *profit distibution*, sertapenerapan agunan dalam pembiayaan di bank syariah, salah satunya peneraoan agunan dalam akad-akad amanah seperti akad *mudhârabah* atau *musyârakah*. Secara asal akad ini tidak diperlukan adanya agunan, akan tetapi demi

kemaslahatan maka diperbolehkan bagi bank syariah untuk menerapkan agunan dalam akad *mudhârabah* atau *musyârakah*.

- e. Istihsan bi al-'urf (istihsan berdasarkan adat kebiasan). Dengan kata lain yang dimaksud dengan istihsan bi al-'urf adalah suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan kebiasaan yang baik. Contoh dalam konteks muamalah adalah jual-beli mu'athah dilarang karena secara qiyas jual-beli ini tidak ada ijab-kabul. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasan di masyarakat maka hukumnya diperbolekan. Begitu pula jual-beli sharf secara sopt dengan masa dua hari. Contoh lainnya adalah kebiasaan masyarakat untuk menentukan jenis mata uang tertentu sebagai mata uang resmi suatu negara.
- f. Istihsan bi al-Dharûrah (istihsan berdasarkan keadaan darurat). Artinya dibolehkan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat. Misalnya dibolehkannya melakukan Repo (Reouschase Agreemnt) surat berharga (SBI, SBSN) oleh bank syariah yang kesulitan likuiditas. Contoh lainnya adlaah dibolehkan menggunakan serta ikut serta sebagai anggota BJPS karena alasan darurat.

Penerapan Motode *Isti<u>h</u>san* pada Bidang Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)

Dalam konteks fikih muamalah perapan metode istihsan sangat diperlukan. Hal ini merupakan pengembangan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan metode istihsan memiliki daya kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan yang serba canggih dan cepat. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi fokus penerapan metode istihsan pada bidang muamalah maliyah. Adapun penerapan metode istihsan dalam bidang mu'amalah maliyah adalah sebagai berikut:

Mempersyaratkan Hak Khiyâr bagi Orang Ketiga yang Tidak Ikut Berakad Jual-Beli (Bai')

Para ulama bersepakat bahwa hak *khiyâr* (hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) berlaku efektif bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli (*Bai'*). Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah bagi kedua belah pihak dipebrolehkan atau salah satu pihak mempersyaratkan adanya hak *khiyâr* bagi pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam akad jual-beli.

Mazhab <u>H</u>anafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut hukumnya adalah boleh dan persyaratan yang dinyatakan itu berlaku efektif.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Bagi kalangan <u>H</u>anafiyah, dasan hukum hal tersebut adalah *isti<u>h</u>san*, yaitu *isti<u>h</u>san bi al-mashla<u>h</u>ah*, dengan mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut menjadi <u>h</u>âjah (kebutuhan) dalam transaksi akad jual-beli yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sedangkan bagi kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dasar hukum hal tersebut ialah *qiyâs*, yakni *qiyâs* yang *nota bene* substansinya sama dengan substansi *isti<u>h</u>san* di atas, tetapi mereka tidak menamakannya *istihsan*.

Kalangan ulama <u>H</u>anafiyah berpendapat bahwa mempersyaratkan hak *khiyâr* tersebut tidak boleh dan persyaratan yang dinyatakan itu tidak sah. Mereka berargumen bahwa hak *khiyâr* merupakan konsekuensi dari adnaya akad jual-beli sehingga ia tidak berlaku efektif bagi orang yang tidak ikut serta dalam akad.

Akad Jual-Beli dengan Mempersaratkan Pembayaran secara Tempo (Bai' al-Taqsîth/al-Ajâl)

Bai' al-Taqsîth (jual-beli secara kredit) secara bahasa artinya membagi-bagi dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian. Dalam kitab al-Mishbâh al-Munîr, (Muhammad 'Ali al-Alfayumi, 1987) dikatakan bahwa al-qisthu adalah al-nashîb yang artinya adalah bagian. Bentuk jamak (plural) adalah aqsâth. Begitu pula dalam kitab Lisân al-'Arab karya Ibn Mandzur, (Ibn Mandzur, 2013) disebutkan bahwa kata al-qisth maknanya adalah al-hishah wa al-nashib artinya porsi dan bagian.

Adapun definisi *bai al-taqsîth* secara terminologis dikemukakan dalam kitab *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah* sebagai berikut:

"Penangguhan pembayaran utang secara terpisah pada waktu yang telah ditentukan" (Lajnah Fukaha Khilafah Utsmaniyah, n.d.).

Dalam *Fatwa Lajnah Dâimah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ* (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) didefinisikan *bai' al-taqsîth* sebagai berikut:

"Menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan".(Al-Iftâ, n.d.)

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *bai' al-taqsîth* adalah "Menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan".

Istilah *bai' al-taqsîth* dalam khazanah fikih klasik belum dikenal oleh para ulama fikih klasik, akan tetapi mereka mengungkapkan dnegan istilah *bai' al-ajâl* (jualbeli tempo). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *bai' al-taqsîth* itu merupakan *furû'* (cabang) dari *bai' al-ajâl*, yaitu menjual barang dengan harga diangsur lebih mahal daripada kontan.(Hidayat, 2015)

Apabila si A dan si B bersepakat untuk melakukan perjanjian akad jual-beli dan keduanya sepakat bahwa pembayaran harga dilakukan secara tempo, apakah akad itu sah dan persepakatan keduanya berlaku efektif.

Kalangan ulama <u>H</u>anafiyah berpendapat bahwa akad jual-beli tersebut sah dan kesepakatan keduanya berlaku efektif. Mereka berargumen dengan dalil istihsan, yakni istihsan dengan dasar pikiran menghilangkan kesukaran dan kesulitan jalannya kehidupan masyarakat, terutama di bidang perdagangan (istihsan bi al-mashlahah). Seiring dengan itum mereka menyatakan bahwa adanya tindakan mempersyaratkan pembayaran harga secara tempo merupakan bagian dari makna mempersyaratkan khiyâr).(Asnawi, 2013)

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual-beli itu batal demi hukum dan kesepakatan keduanya juga batal, hal ini berimplikasi terhadap tidak efektifnya akad tersebut. mereka mereka, hal demikian bukanlah tindakan mempersyaratkan khiyâr, melainkan mempersyaratkan vang merusak/membatalkan akad jual-beli itu karena hal demikian, sama saja dengan menggantunkan akad itu kepada sesuatu vang mengandung gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan).(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Perihal Penerimaan Hibah Menguasai Barang Hibah Tanpa Seizin Pemberi Hibah

Apabila si A memberikan hibah sebidang tanah kepada si B maka kapankah si B mempunyai hak atas tanah itu? Apakah saat si B mengcuapkan shîghat alqabûl ataukah pada saat ia menguasi tanah itu?

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa si B mempunyai hak atas tanah itu pada saat ia mengcapkan *shîghat al-qabûl* dan sejak itu si A dapat dipaksa untuk atau harus menyerahkan tanah itu kepada si B. Mereka memandang tindakan penguasaan objek hibah (*al-qabdh*) itu hanyalah merupakan unsur penyempurna akad hibah (*syarth al-kamâl*), bukan unsur kesahan (*syarth al-shihâh*). Penerima hibah secara otomatis mempunyai hak atas objek hibah ketia ia telah mengucapkan *shîghat al-qabûl*.(Asnawi, 2013)

Kalangan ulama <u>H</u>anafiyah, Syafi'iyah dan <u>H</u>anabilah berpendapat bahwa si B mempunyai hak atas tanah itu pada saat ia telah mengucapkan *shîghat alqabûl* dan menguasai tanah itu.

Mereka memandang tindakan penguasaan objek hibah (al-qabdh) itu merupakan unsur kesahan (syarth al-shihah) akad hibah, bukan unsur penyempurna (syarth al-kamâl). Penerima hibah secara otomatis mempunyai hak atas objek hibah ketika ia telah mengucapkan shîghat al-qabûl dan menguasai objek hibah itu. Ketiga golongan ulama ini pun perbeda pendapat perihal tindakan penguasaan objek hibah oleh penerima hibah tanpa seizin penerima hibah.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan <u>H</u>anabilah memandang tidak sah penguasaan objek hibah itu

kecuali dengan seizin permberi baik penguasaannya itu pada saat berakad maupun sedudahnya. Mereka berargumen dengan dalil qiyâs, yakni kasus tindakan penguasaan objek hibah oleh penerima hibah tanpa seizin pemberi hibah di-*aivâs*-kan kepada kasus tindakan penguasaan objek jual-beli oleh pembeli tanpa membayar harganya terlebih dahulu kepada penjual, hal demikian tidak sah kecuali engan seizin penjual; dan illah-nya ialah penguasaan objek akad. Lagi pula, dalam kasus hibah, pada hakikatnya si pemberi hibah tidak berkewajiban menyerahkan objek hibah dan si penerima hibah tidak mempunyai hak atas obiek hibah.

Kalangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila penguasaan objek (*al-qabdh*) itu terjadi pada saat akad hibah maka hal demikian hukumnya boleh atau sah; namun, apabila terjadinya sesudah berlewatnya akad maka penguasaan objek (al-qabdh) itu tidak boleh atau tidak sah kecuali dengan seizin pemberi hibah. Jadi, kalangan ulama Hanafiyah membedakan antara penguasaan objek hibah pada saat terjadinya akad dan penguasaan objek hibah sesudah berlewatnya akad. Dalam pendapatnya tersebut, mereka mengemukakan argumen berupa dalil istihsan. Dalam deskripsi istihsan dimaksud, mereka menjelaskan bahwa al-qabdh dalam akad hibah itu berfungsi sebagai ekspresi qabûl; dan al*qabdh* itu oenentu adanya hak/kepemilikan atas objek karena tujuan pokok hibah adalah memberikan kepemilikan. Maka menurut mereka, ijab dari pemberi hibah merupakan ekspresi penyerahan wewenang/hak keada penerima hibah untuk menguasai objek hibah; dan itu berarti izin secara implisit dari pemberi hibah. Adapun qaid "terjadi pada saat akad" didasarkan, menurut mereka pada pandangan bahwa berhubungan secara kronologis dengan qabûl dan qabûl terikat dengan "saat terjadinya akad", begitu juga hanyalnya *al-qabdh* ".(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Akad Syirkah Mufâwadhah

Secara etimologis, *syirkah* ini dinamakan *syirkah al-mufâwadhah* karena adanya kesamaan dalam hal modal, *profit*, pengelolaan harta, dan lain sebagainya.(Adam, 2017) Adapun definisi *syirkah al-mufâwadhah* secara terminologis menurut Wahbah al-Zu<u>h</u>aili adalah:

وهي في الاصطلاح: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساوبين في رأس مالهما وتصر فهما ودينهما أي (ملتهما)، ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شريكه الآخر من حقوق ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر، أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه، ويكون كل واحد منهما فيما يجب عليه واحد منهما غيما يجب عليه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه

"Bentuk kejasama antara dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual-beli. Dengan kata lain, masing-masing pihak terkait dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, maisng-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menrima hak, dan pada sat yang sama juga menjadi kafil (penanggung) atas kewajiban mirtanya". (Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Para ulama berbeda berpendapat mengebai hukum kebolehannya. Ulama Hanafiyah berpedapat bahwa akad syirkah al-mufâwadhah hukumnya diperbolehkan yang didasarkan atas persamaan, baik dalam modal, keuntungan, keja, rugi dan agama segaiamana dijelaskan pada definisi di atas. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah (batal). Adapun ulama Malikiyah membolehkannya secara mutlak. Dengan kata lain tidak disyaratkan harus adanya persamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah kebolehan akad syirkah al-mufawadhah bukan seperti pendapat sebagaimana ulama Hanafiyah. Mereka memperbolehkan akad ini secara mutlak masing-masing berserikat mengelola modal tanpa harus membutuhkan pendapar rekan sekutunya.(Rasyid Hasan Khalil, 1981)

Dalam kitab al- $Hid\hat{a}yah$ sebagaimana dikutip oleh al-Bugha dijelaskan mengenai argumentasi ulama \underline{H} anafiyah yang membolehkan akad syirkah al- $muf\hat{a}wadhah$ sebagai berikut:

"Landasan argumentasi kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah* berdasarkan *isti<u>h</u>san*. Dalam kitab *al-Hidâyah* disebutkan bahwa *syirkah* ini diperbolehkan menurut pandangan kami (mazhab <u>H</u>anafi) berdasarkan *isti<u>h</u>san*".(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Selain berdasarkan *isti<u>h</u>san*, kebolehan akad *syirkah al-mufâwadhah* ini berdasarkan *atsar* dan interaksi kebiasaan. Adapun *Atsar* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

فاوضوا فانه اعظم للبركة

"Samakanlah modal kalian, sebab hal tersebut lebih besar keberkahannya"

اذا فاو ضتم فاحسنوا المفاوضة

"Apabila kalian melakukan bisnis dengan akad kerjasama musfâwadhah maka baguskanlah modal kalian". Di dalam kitab *al-Fat<u>h</u>* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha disebutkan bahwa hadis ini tidak dikenal dalam kitab-kitab hadis, *wallahu'Alam*, maka *atsar* tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi.

Adapun landasan berdasarkan '*urf* atau kebiasaan orang-orang yang mempraktikan akad *syirkah almufâwadhah* tanpa ada yang mengingkarinya, maka kebiasaan tersebut seperti ijmak/konsensus maka dengan ini ditinggalkan *qiyâs*. Apabila riwayat *atsar* tersebut dinilai lemah dan tidak dapat dijadikan landasan argumentasi (untuk kebolehan akad *syirkah almufâwadhah*) maka argumennya dikembalikan kepada *istihsan* dan kebiasaan/*urf*. Ini adalah bentuk *istihsan li al-'urf* atau kebiasan menurut mazhab <u>H</u>anafi atau *istihsan bi al-ijmâ*.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Akad Jual-Beli Istishna'

Kata *istishna*' berasal dari kata *shana'a* yang sama dengan kata *ja'ala* atau *khalaqa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan. Akad jualbeli *istishna*' pada prinsipnya sama dengan akad jualbeli *salam*, yaitu merupakan pengecualian dari syarat jual-beli yang berlaku umum, wujudnya objek akad pada saat akad jual-beli dialukan.(Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017)

Sedangkan secara istilah para fukaha memberikan definisi *istishna* ' sebagai berikut:

"Akad meminta seseotang untuk membuatkan sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan".(Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Kalangan ulama <u>H</u>anafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada *qiyâs* dan kaidah umum, maka akad *istishna*' tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual-beli barang yang tidak ada (*bai*' *ma*'dûm) seperti akad *salam*. Jual-beli barang yang tidak ada tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw untuk menjual sesuai yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual-beli, karena merupakan jual-beli barang yang tidak ada.

Bagi ulama <u>H</u>anafiyah bahwa akad *istishna*' boleh dilakukan berdasarkan dalil *isti<u>h</u>san* yang ditunjukan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi sebuah konsensus/ijmak tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis, "*umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan*" dan hadis "*apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah*".(Wahbah al-Zuhaili, 2012)

Mensedekahkan Seluruh Harta dan Tidak Berniat untuk Berzakat

Para ulama sepakat bahwa tidak menunaikan zakat kecuali harus disertai niat untuk kewaiibanya berupa menunaikan mengerluarkan sebagian hartanya (tertentunya) dan menyerahkannya kepada *mustahiqnya*. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bagi orang yang terkena kewajiban zakat ia menyedekahkan seluruh hartanya akan tetapi tidak disertai niat membayar zakat, apakah kewajiban zakatnya gugur atau tetap adanya kewajiban berzakat?

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak gugur, Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha berpendapat sebagai berikut:

"Apabila ia menyedekahkan seluruh hartanya dan tidak disertai niat untuk menunaikan zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini".(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

Lebih lanjut al-Bugha mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* sebagai berikut:

"Apabila seseorang menyedekahkan seluruh hartanya secara tathawu (sunah) dan tidak berniat zakat maka tidak bisa dikatakan zakat".

Abu <u>H</u>anifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa zakat tersebut gugur. Dalam kitab *al-Hidâyah* sebagaimana dikutip oleh al-Bugha disebutkan bahwa siapa yang mensedekahkan seluruh hartanya, tidak diringi niat untuk berzakat, maka kewajiban zakat terseut gugur. Dasar argumentasi mazhab <u>H</u>anafi bahwa kewajiban zakat gugur adalah berdasarkan *isti<u>h</u>an* karena apabila berdasarkan *qiyâs* kepada shalat yang harus ditegaskan niatnya maka kewajiban tidak tidak akan gugur, kana hukum yang sunah dan wajib keduanya sama-sama disyariatkan.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013) Dengan demikian menurut <u>H</u>anafi berdasarkan *isti<u>h</u>san* mensedekahkan seluruh harta tanpa disertai niat maka kewajiban zakat adalah gugur.

Masalah Zakat Kontemporer

Istihsan digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berkalu secara konvensional, seperti dengan menggunakan qiyâs jaly atau dalil umum menurut caracara biasa dilakkan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan ukum yang dihasilkan kuramh (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari

penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (penggati) dari penedekatan yang konvensional tersebut. pendekatan tersebut disebut dengan *istihsan*.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan berkembang dan semakin Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum Islam. Apabila hanya semeta mengandalkan dengan atau metode pendekatan cara (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik (tepat). Karena itu, si mujtahid harus mempu menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama, meskipun dengan berat hati untuk meninggalkan pendekatan lama yang selaa ini ia gunakan dan ia pertahankan dengan setia. Oleh kerana itu. kecenderungan untuk mengguakan istihsan akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.(Amir Syarifuddin, 2011)

Salah satu contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasan ini adalah masalah zakat. Dalil syara' yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih yang kebanyakan berbicara dalam kaitan dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal dewasa ini perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesat dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan di masa mendatang khususnya yang menyangkut masalah zakat, hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai lagi. Dalam menghadapi masalah ekonomi, jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka, sedangkan pihak yang mengaharapkan bantuan melalui penghimpunan dana sosial melalui zakat semakin banyak. Katakanlah umpamanya "zakat profesi" . kalau berkutat dengan pendekatan konvensional yang selama ini digunakan, masalahnya tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu diperlukan upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya. Upamanya berdalil dengan umumnya lafadz "ma kasabtum" yang terdapat dalam Alquran surah al-Baqraah (2) ayat 264. Dalam ayat tersebut sektor jasa dan profesi secara jelas terkandung di dalamnya.(Amir Syarifuddin, 2011)

Tawarruq Multiguna untuk Pembiayaan Produktif

Pembiayaan multiguna dapat menggunakan skim tawarruq emas atau bai' al-wafâ wa al-ijârah yang

disebut dengan akad *bai' al-istighlâl*. Secara etimologis, *al-tawarruq* adalah bentuk mashdar dari kata *tawarraqa*. Dikatakan الحيوان تورق (binatang itu memakan daun). أُوْرَقُ dikasrahkan *ra*-nya artinya dirham yang dicetak dari perak. Menurut sebagian riwayat artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak.(Hidayat, 2015)

Kata *al-tawarruq* diartikan daun maksudnya adalah memperbanyak harta. Dengan demikian *al-tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.(Abd al-Rahman al-Sa'di, 2008) Dalam kajian literatur *al-tawarruq* adalah berbagai cara yang ditempuh seseorang demi mendapatkan uang tunai. Adapun definisi *al-tawarruq* secara terminologi adalah:

"Seseorang yang membeli barang dagangan secara tidak tunai (diangsur), kemudian ia (pembeli) menjualnya kepad orang lain selain penjual secara tunai (*cash*) dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian, tujuannya untuk memperoleh uang tunai (*cash*) (bukan dalam bentuk barang"(Hidayat, 2015)

Definisi lain menyebutkan bahwa *al-tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai. (Muhamad Nadratuzzaman, 2013)

Adapun *bai' al-istighlâl* yang terdapat dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Islam) Pasal 119 Qanun Turki 1876 H. Dalam Pasal 119 tesebut *bai al-istighlâl* didefinisikan sebagai berikut:

"Bai' al-istighlâl adalah jual-beli wafâ yang mana pembeli menyewakan kembali barang yang dibelinya kepada penjual".

Jual-beli *istighâl* pada prinsipnya merupakan hubungan konsep jual-beli *wafâ* dengan konsep *ijârah* (sewa-menyewa), yakni pemanfaatan objek-jual beli dengan cara disewa atau disewakan. Dengan kata lain, barang yang sudah dijual kepada pembeli, diseakan kembali oleh pembeli kepada penjual.

Dalam perspektif mazhab <u>H</u>anafi, akad *bai' alistighlâl* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan. ('Utsmani, 2005) Adapun menurut Rafiq Yunus al-Mishri akad *bai' al-istighlâl* merupakan akad yang terlarang. Rafiq Yunus al-Mishri menyatakan bahwa:

"Jual-beli istighlâl mirip dengan bai' al-wafâ, akan tetapi (perbedaannya) adalah muqtaridh (debitur dalam akad qardh/utang-piutang (penjual pada akad jual-beli pertama) menyewa barang yang dijualnya dari muqridh (kreditur dalam akad qardh (pembeli pada akad jual-beli pertama); maka jual-beli istighlâl termasuk akad jual-beli shûry (artifisial) karena tujuan pembeli (dalam akad jual-beli pertama) adalah untuk mencarii profit (transaksi riba) dengan cara sewa".(Rafiq Yunus al-Mishri, 2009)

Skim tawarruq emas ini diambil dari banyak buku fikih, terutama buku, tawarruq mashrafi 'an tharîq alma'adin (tawarruq di perbankan melalui jual-beli emas). Mayoritas ulama fikih menyetujui bai' tawarruq, namun Umar Ibn Abd al-Aziz, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpandangan makruh hukumnya. Fatwa ulama OKI hanya mengharamkan tawarruq munazzam yang banyak dilakukan sebagian bank syariah Malaysia. Tawarruq munazzam ini tidak lain adalah bai' al-'înah itu sendiri, maka hukumnya dilarang.(Mohammmad Mufid, 2016)

Kalau berpegang pada pendapat mayoritas ulama, maka penerapan tawarruq, tidak bermasalah. Namun, jika berpegang pada pendapat Umar Ibn Abd al-Aziz, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang kemakruhannya, maka hal itu dapat dihilangkan dengan metode istihsan. Jika menggunakan metode istihsan, maka harus bisa ditunjukkkan bahwa tawarrug yang hendak diterapkan di perbankan, harus berbeda karakternya dengan tawarruq yang dimakruhkan, oleh sebagian ulama itu. Pada tawarruq perbankan itu, harus ada syarat ketat dari bank syariah, yakni bahwa dana tawarruq harus digunakan untuk sektor riil (yang produktif) dan officer perbankan harus mengontrol kebenaran terwujudnya rii1 sektor lapangan.(Mohammad Mufid, 2016)

Jadi, untuk mewujudkan itu officer bank syariah dlaam *visibility study* dan analisa pembiayaan harus mensyaratkan bahwa penggunaan uang *tawarruq* memang untuk sektor riil, seperti usaha mikro, pertanian dan kegiatan usaha produktif lainnya, atau semi produktif seperti pendidikan, renovasi rumah, dan sebagainya. Multiguna artinya penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk apa saja, asalkan untuk sektor riil yang sesuai syariah.

Bai al-wafâ dan bai al-istighlâl juga dapat digunakan untuk pembiayaan multiguna. Mekanismenya, pertama, nasabah menjual asetnya (rumah, perkebunan, atau mobil), ke bank syariah dengan harga misalkan Rp. 200 juta, dengan janji nasabah akan membeli (melunasi) kembali rumah tersebut 2 tahun depan dengan harga yang sama, yakni Rp. 200 juta. Dengan jual-beli ini, nasabah mendapatkan uang cash dari bank dan dengan demikian rumah menjadi milik bank. Kedua, selanjutnya, bank

menyewakan rumah itu kepada nasabah itu kembali dengan margin tertenu.(Agustianto, 2014)

Bank mendapatkan keuntungan (margin) dengan cara penyewaan tersebut. besaran biaya sewa bulanan dapat memilih dua alternatif, *pertama*, biaya sewa bulanan dari margin disesuaikan dengan besaran cicilan normal pembiayaan, misalnya Rp. 10 juta per-bulan. Ketika masa sewa (dengan akad *ijârah*) selesai, maka rumah itu kembali dijual bank kepada nasbaha dengan harga tertentu. Pilihan *kedua*, dalam perjanjan itu disyaratkan nasabah untuk menyimpan sejumlah dana setiap bulannya misalkan Rp. 9,1 juta dan ketika jumlah simpanan mencapai Rp. 200 juta, maka janji nasabah untuk membeli kembali rumah tersebut diwujudkan. Syarat tersebut tidak dilarang dalam syariah, karena itu ia dibolehkan.(Agustianto, 2014)

SIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbâth alahkâm, yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara'. istihsan memiliki peran yang menentukan dalam fikih Hanafi dan Maliki, karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan istihsan dan telah ditetakan hukumnya. Adapun penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbâth al-ahkâm apabila hal tersebut dilakukan dengan hawa nafsu dan mencari kelezatan semata (taladzuz). Penerapan metode istihsan dalam bidang mu'âmalah mâliyyah berdasarkan hasil penelitian penulis dapat terimplemnetasikan pada 8 akad diantaranya adalah (a) Mempersyaratkan Hak Khiyâr bagi Orang Ketiga yang Tidak Ikut Berakad Jual-Beli (Bai'); (b) Akad Jual-Beli dengan Mempersaratkan Pembayaran secara Tempo (Bai' al-Taqsîth/al-Ajâl); (c) Perihal Penerimaan Hibah Menguasai Barang Hibah Tanpa Seizin Pemberi Hibah; (d) Akad Svirkah Mufâwadhah: Akad Jual-Beli Istishna'; (f) (e) Mensedekahkan Seluruh Harta dan Tidak Berniat untuk Berzakat; (g) Masalah Zakat Kontemporer; Tawarruq Multiguna untuk Pembiayaan Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Utsmani, M. T. (2005). Fiqh al-Buyû 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah Ma'a Tahtbîqatihi al-Mu'ashîrah Muqâran (an) bi al-Qawânin al-Wadh'î. Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Abd al-Rahman al-Sa'di. (2008). Fiqih Jual Beli: Panduang Praktis Bisnis Syariah. Senayan.
- Abu Hamid al-Ghazali. (1989). *al-Mankhûl Min Ta'lîqât al-Ushûl*. Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.
- Adam, P. (2017). Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi. Refika Aditama.
- Adi, R. (2004). Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Granit.
- Agustianto. (2014). Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indoneisaaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah.

- Iqtishad Publishing.
- Al-Iftâ, L. D. li al-B. al-'Ilmiyyah wa. (n.d.). *Fatâwâ al-Lajnah al-Dâimah*. Riasah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta.
- Al-Razi, F. al-D. (1997). *al-Mahshûl*. Muasasah al-Risalah.
- Ali Hasab Allah. (1971). *Ushûl al-Tasyrî' al-Islamâmî*. Dar al-Ma'arif.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Asnawi. (2013). Perbandingan Ushul Fiqh. Amzah.
- Bakhtiar Hasan. (2015). Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Methode Istinbath Hukum Islam. *Al-Risalah*, *15*(1), 59.
- Beik, M. al-K. (2003). *Ushûl al-Fiqh*. Dâr al-Hadîts.
- Chadzik, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(02), 338.
- Habibullah, E. S. (2017). Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi 'I Tentang Al-Istihsan. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 456.
- Hanbal, A. I. (2001). al-Musnad. Muasasah al-Risalah.
- Hidayat, E. (2015). Figh Jual Beli. Rosdakarya.
- Ibn Mandzur. (2013). Lisân al-'Arab. Dâr al-Hadîts.
- Jaih Mubarok dan Hasanudin. (2017). Fikih Mu'alamah Maliyyah: Akad Jual-Beli. Simbiosa.
- Kadenun. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *Qalamuna*, *10*(2), 101.
- Khallaf, A. al-W. (2013). *Mashâr al-Tasyrî' al-Islâmî fîma Lâ Nash Fîh*. Dâr Ibn al-Jauzi.
- Lajnah Fukaha Khilafah Utsmaniyah. (n.d.). *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Nur Muhammad.
- Ma'ruf Amin. (2008). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Elsas.
- Mohammmad Mufid. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, J. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. UII Press.
- Muhamad Nadratuzzaman. (2013). *Produk Keuagan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Kompas Gramedia.
- Muhammad 'Ali al-Alfayumi. (1987). *al-Mishbâh al-Munîr*. Maktabah Libanon.
- Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Ushûl al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i. (1940). *al-Risâlah*. Maktabah al-Halabi.
- Musthafa Dib al-Bugha. (2013). Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fîha: Mashâdir al-Tasyrî al-Tabi'iyyah fî al-Fiqh al-Islâmî. Dâr al-Qalam.
- Nur'aini, A. M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 3.

- Rafiq Yunus al-Mishri. (2009). *Buhûts fî Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*. Dar al-Maktabi.
- Rasyid Hasan Khalil. (1981). al-Syirkât fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah. Dar al-Rasyid.
- Romli. (1999). *Muqaranah MAzahib fil Ushul*. Gaya Media Pratama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.
 Rajawali Pers.
- Syawaluddin Hanafi. (2020). Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 340.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Dâr al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Isâmî wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Zaky al-Din Sya'ban. (1965). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Dar al-Ta'lif.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Ghalia Indonesia.